

**KAJIAN KARAKTERISTIK BERLOKASI AKTIVITAS PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PECINAN SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

RISA NIKEN RATNA TRI HIYASTUTI

L2D 002 432



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAK

“Dualistik” merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi umum kota-kota di Indonesia saat ini. Istilah dualistik itu sendiri memiliki konotasi pada terjadinya pertemuan dua kondisi atau sifat yang berbeda. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat kota tercipta kegiatan yang bersifat formal dan informal (Sujarto dalam Widjayanti: 2000). Sektor formal diwadahi dalam ruang formal sesuai dengan yang telah diatur dalam RDTRK, sedangkan sektor informal belum terakomodasi dalam wadah serta aturan kebijakan pengelolaan yang rinci. Sektor informal merupakan suatu fenomena umum yang tak dapat dihindarkan di wilayah perkotaan. Keberadaan sektor ini disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang semakin hari semakin bertambah. Salah satu sektor informal dalam bidang perdagangan dan jasa yang sering dijumpai di kota adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang senantiasa tumbuh subur memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial. Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya aturan tentang wadah yang dapat menampung aktivitas PKL dalam suatu ruang informal di Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Demikian pula yang terjadi di Kawasan Pecinan Semarang, dimana dalam RDTRK tahun 2000-2010, berdasarkan fungsi BWK I merupakan kawasan campuran dengan dominasi kegiatan permukiman dan perdagangan. Dengan dominasi kedua kegiatan tersebut, maka di kawasan ini banyak terdapat bangunan ruko. Karakteristik tersebut memicu pesatnya perkembangan PKL di kawasan ini. Dalam beraktivitas PKL tersebut memanfaatkan trotoar, badan jalan serta depan pertokoan tanpa memperhatikan ruang aktivitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Usaha penertiban dan pengusuran aktivitas PKL yang dilakukan di kawasan tersebut tidak dapat memecahkan masalah dalam mengatasi keberadaan aktivitas berdagang PKL. Selain hal itu, juga belum terdapat suatu acuan yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan PKL sebagai pengaturan dan pengendalian aktivitas PKL dalam penggunaan ruang dan tempat usahanya, sehingga mengakibatkan para PKL tetap menggunakan lokasi berdagang semula walaupun telah disediakan lokasi baru untuk tempat mereka menjajakan barang dagangannya. Padahal sebenarnya lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi yang tidak sesuai dengan SK Walikota Semarang. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena belum teridentifikasinya karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan ini.

Penelitian Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang ini bertujuan untuk menemukenali karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang sebagai kawasan campuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menjadikan teori sebagai dasar dalam merumuskan variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi, cross tabulation dan deskriptif komparatif serta deskriptif statistik. Adapun analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis karakteristik berlokasi aktivitas PKL eksisting di Kawasan Pecinan Semarang, analisis karakteristik berlokasi berdasarkan persepsi PKL di Kawasan Pecinan Semarang serta analisis persepsi konsumen terhadap keberadaan PKL di Kawasan Pecinan Semarang. Output dari ketiga analisis tersebut dijadikan input dalam analisis karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang sehingga nantinya akan menghasilkan rumusan karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang yang berfungsi sebagai kawasan campuran serta karakteristik berlokasi aktivitas PKL pada setiap spot-spot lokasi dagang PKL yang terdapat di kawasan ini.

Adapun karakteristik berlokasi PKL di Kawasan Pecinan Semarang ini meliputi ruang aktivitas yang digunakan adalah badan jalan. Hal ini dikarenakan sebagian besar lokasi dagang PKL yang terdapat di kawasan ini memang dikhususkan bagi PKL, dimana hal tersebut menjadikan PKL ini memiliki sifat layanan menetap. Adapun sarana yang digunakan yaitu jongko/ meja untuk keteraturan dan ketertiban dalam penggunaan ruang usahanya. Jenis dagangan yang dijajakan yaitu makanan mentah dan semi olahan serta makanan khas Cina dengan aglomerasi barang dagangan bercampur dengan jenis barang dagangan lain yang tidak sejenis. Hal tersebut menjadikan tingkat pendapatan PKL di kawasan ini relatif tinggi yaitu antara Rp500.000,00-Rp.1.000.000,00. Dengan diketahuinya karakteristik berlokasi PKL di Kawasan Pecinan diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan PKL di kawasan tersebut berdasarkan karakteristik berlokasi PKL dalam menjajakan barang dagangannya tanpa menimbulkan permasalahan yang baru.

Kata Kunci : Karakteristik Berlokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kawasan Pecinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Dualistik” merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi umum kota-kota di Indonesia saat ini. Kondisi ini tidak hanya tercermin pada penampilan fisik kota-kota yang ada, tetapi juga pada aspek kehidupan sosial-ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Istilah dualistik itu sendiri memiliki konotasi pada terjadinya pertemuan dua kondisi atau sifat yang berbeda. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat kota tercipta kegiatan yang bersifat formal dan informal (Sujarto dalam Widjayanti: 2000). Pada aspek fisik kota, dualistik tersebut terjadi pada pembauran pola dan struktur rancang kota antara modern dan tradisional yang berbaur secara integral (Sujarto dalam Widjayanti: 2000). Perkembangan dualistik ini sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota akibat belum matangnya perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota, kondisi dualistik ini sering berkembang secara spontan, tidak terencana dan liar.

Menurut Manning (1996: 111), aktivitas disebut formal atau tidak yang membedakannya adalah birokrasi dalam bidang perijinan. Sektor formal cenderung lebih banyak mendapat perlindungan dari pemerintah daripada usaha informal. Sedangkan pengertian sektor informal menurut Kamus Tata Ruang (1997: 97) adalah usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikannya. Sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang terutama bertujuan mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam sektor informal ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak trampil dan kebanyakan merupakan kaum migran atau urban (Sethuraman dalam Ridlo, 2001: 32-33). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bromley di Cali, Columbia, mengenai sektor informal, menunjukkan bahwa dalam sektor informal terdapat beberapa segi yang patut diperhatikan yaitu kegiatan ini bukanlah suatu kegiatan yang terpisah sama sekali dari sektor formal, bahkan lebih dari itu, sektor ini memperoleh pengakuan kegiatannya justru dari sektor formal itu sendiri dan gejala formal-informal merupakan karakteristik kegiatan ekonomi negara-negara sedang berkembang, dimana sektor informal mendominasi hampir seluruh kegiatan bidang jasa (Alisjahbana, 2005: 32).

Munculnya sektor informal diakibatkan karena ketidakmampuan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja yang semakin hari semakin bertambah. Dalam penyerapan tenaga kerja sektor formal kurang memadai sebagai penyangga sistem secara keseluruhan, sektor formal tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang berlebih dan tidak dapat

memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir dan sektor informal muncul ke permukaan. Hal tersebut dikarenakan sektor informal memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk kedalamnya, karena sektor ini merupakan katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan (Rachbini, 1994: 19-29) yang dipandang sebagai alternatif pemecahan masalah kesempatan kerja di Indonesia (Sumodiningrat dalam Alisjahbana, 2005: 12). Dalam proses informalisasi dari kegiatan ekonomi, sektor informal dapat dipandang sebagai upaya untuk survive, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Sektor informal cukup efisien dalam berbagai kegiatannya dan menguntungkan, selain dapat menyalurkan tenaga kerja juga dapat menopang kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi rendah karena sektor ini mampu menyediakan kebutuhan yang murah bagi masyarakat miskin (Rachbini, 1994: 9-17). Keberadaannya di kota ini karena kota menjanjikan penghasilan yang lebih baik (Michael dalam Manning, 1996: 7).

Salah satu sektor informal dalam sektor perdagangan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana dalam aktivitasnya dimungkinkan terjadinya mobilitas vertikal pada peningkatan taraf hidup, sehingga kegiatan sektor informal bukan lagi sekedar aktivitas untuk bertahan hidup. Keberadaan sektor ini mampu mengangkat stratifikasi sosial pelaku (Mustofa dalam Alisjahbana, 2005: 13). PKL sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang “produktif” di kota. PKL dipandang sebagai suatu “jawaban terakhir” yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa-kota yang besar, perkembangan kota, penambahan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja (Bromley dalam Alisjahbana, 2005: 35). Dalam melaksanakan aktivitasnya ini, pada dasarnya PKL memiliki unsur kreativitas yang terlihat pada pemilihan lokasi, penentuan waktu dagang serta penyediaan entitas dan variasi barang dagangan yang dijajakan. Selain itu, mereka juga kreatif dalam menciptakan jaringan usaha, menarik pembeli, mendekati pelanggan, dan memuaskan pelanggan dengan harga yang murah serta kualitas barang yang tidak begitu mengecewakan. Dengan demikian pada dasarnya PKL berjasa terutama bagi masyarakat perkotaan menengah ke bawah, antara lain dalam mendistribusikan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Selain unsur kreativitas tersebut, dimensi kerakyatan juga tercermin dalam aktivitas PKL ini. Dimensi ini terlihat pada aktivitas tawar menawar yang secara nyata bersifat komunikatif dengan interrelasi antara PKL dengan konsumennya yang tidak dapat ditemukan pada pelaku ekonomi lainnya (Alisjahbana, 2005: 64-100).

Selain sisi positif tersebut, PKL selalu menjadi isu strategis, dimana dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) belum terdapat wadah bagi PKL sehingga PKL ini memanfaatkan ruang-ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai dan diatas saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pengunanya dengan baik

(Soetomo dalam Widjayanti, 2000). Akibat kegiatan PKL yang tidak teratur, ruang dan tempat aktivitasnya dengan tampilan bentuk wadah fisik yang beragam sering dianggap merusak kawasan dan wajah fisik suatu lingkungan kota yang sudah dibangun dengan rapi, penampilan kota menjadi tidak teratur dan kumuh sehingga menurunkan nilai estetika kota. Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota dan juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan tersebut. Penggunaan ruang aktivitas PKL yang tidak sebagaimana mestinya, seperti di trotoar mengakibatkan terganggunya sirkulasi pejalan kaki, pemanfaatan badan jalan menimbulkan kemacetan lalu lintas, pemanfaatan di tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL dapat mengakibatkan terganggunya aliran air. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sering melakukan penertiban dan penggusuran, namun tidak lama lagi PKL tumbuh kembali beraktivitas di lokasi yang semula.

Upaya penertiban dan penggusuran juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan menyediakan lokasi tempat beraktivitas yang telah ditentukan (relokasi). Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena PKL tumbuh beraktivitas kembali di lokasi semula. Hal tersebut dikarenakan para PKL beranggapan bahwa relokasi selalu bersifat represif bukan bersifat memfasilitasi ataupun melindungi keberadaan mereka. Dengan adanya relokasi ini mereka berharap mendapatkan tempat usaha yang strategis dan membuat kehidupan mereka lebih terjamin, namun pada kenyataannya dengan relokasi ini mereka lebih sengsara dan dagangannya tidak laku karena keberadaannya di lokasi yang baru hanya menjadi jauh dengan konsumennya (Alisyahbana, 2005: 8). Bagi PKL, strategi yang tepat digunakan untuk menata sektor informal adalah membuat konsep yang jelas, terarah, dan terukur. Konsep itu hanya bisa dibuat apabila terdapat kebersamaan antara pemerintah dan PKL dalam merumuskan konsep penataan ruang dalam hal ini yang lebih mengakomodasikan berbagai pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya mereka setuju dengan adanya aturan tersebut, mengingat tanpa adanya suatu aturan yang baik, maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang tertib (Alisyahbana, 2005: 83).

Dalam perkembangannya, Kota Semarang juga mengalami masalah dengan kondisi dualistik dan mengalami pula penertiban dan penggusuran PKL terutama di kawasan-kawasan fungsional Kota Semarang. Di kawasan fungsional Kota Semarang saat ini nampak berkembang dengan pesat aktivitas PKL. Seperti di kawasan perkantoran atau pendidikan di sekitar Jalan Imam Barjo, aktivitas PKL berkembang pesat menempati sepanjang trotoar jalan tersebut, sehingga PKL tersebut berderet-deret menutupi gedung-gedung yang terdapat di kawasan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian diambil suatu tindakan penertiban dan penggusuran, dimana pihak UNDIP memberikan sebagian tempat parkir sepeda motornya, digunakan untuk menampung PKL-PKL tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat pula PKL yang beraktivitas di tempat semula di